DARBENI RIZKI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR DARBENI RIZKI

2025

www.bprdarbenirizki.co.id

PT BPR Darbeni Rizki berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta merupakan peserta penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

DARBENI RIZKI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Komp. Taman Surya Buana Blok B.6 Cipadu,
Larangan - Kota Tangerang 15155
Telp. (021) 730 3059 - Fax. (021) 732 2561
Email : darbeni_rz@yahoo.co.id

PT BPR DARBENI RIZKI

LEMBAR PERSETUJUAN

Kota Tangerang, 28 April 2026
PT BPR Darbeni Rizki

Hendra Nugraha	**Sari Fitriah Habiba**
Direktur Utama	Direktur

Mengetahui/Menyetujui

A. Teguh Galih Pamenang	**Agus Purnomo**
Komisaris Utama	Komisaris

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM 1
BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 3
A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola 3
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 6
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR 7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 7
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 7
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR 7
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 8
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 8
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR 8
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR 8
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS 8
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 9
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun 9
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 9
K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 10
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi 10
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 10
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain 11

BAB I
PENJELASAN UMUM

Penguatan penerapan tata kelola penting dilakukan oleh BPR untuk menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks dalam rangka peningkatan daya saing BPR. Tata Kelola yang Baik pada BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan BPR Syariah sehingga penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR Syariah yang stabil dan berkelanjutan. Penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah juga diperlukan seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi yang meningkatkan risiko pada BPR.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesinambungan usaha BPR serta berujung pada pencabutan izin usaha. Dengan demikian, penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi penting menjadi perhatian BPR dan BPR Syariah. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, dan manajemen risiko serta anti fraud, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR.

PT. BPR DARBENI RIZKI telah menerapkan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola BPR dimaksud yaitu BPR telah melaksanakan prinsip penerapan tata kelola dengan baik, dilandaskan pada prinsip dasar yang mencakup :

a. Keterbukaan (*transparency*).
b. Akuntabilitas (*accountability*)
c. Tanggung jawab (*responsibility*)
d. Independensi (*independency*)
e. Kewajaran (*fairness*)

Berdasarkan hasil *self assessment* posisi tahun 2025, PT.BPR Darbeni Rizki memperoleh Nilai Komposit: 2 (dua), dimana rincian peringkat masing-masing faktor serta Nilai Komposit hasil *self assessment* adalah sebagai berikut :

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

No	Faktor	Peringkat
1.	Pemegang Saham	1
2.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	2
3.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	2
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	2
No	Faktor	Peringkat
6.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2
7.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
8.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0
9.	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	2
10.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1
11.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2
12.	Rencana Bisnis BPR	3
Nilai Komposit		2

Kesimpulan Akhir :

Berdasarkan hasil Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT.BPR darbeni Rizki Periode smester 2 tahun 2025, Nilai Komposit sebesar 2 dengan predikat baik.

BAB II
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF* ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Komplek Taman Surya Buana Blok B6, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang 15155
Nomor Telepon	:	021-7303059
Penjelasan Umum	:	Pelaksanaan Tata Kelola PT.BPR Darbeni Rizki secara umum cukup baik, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang cukup memadai. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	**Faktor Positif sebagai berikut :** **a. Struktur** : Jumlah Anggota Direksi sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga proses penerapan tata kelola dapat berjalan dengan optimal, BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian internal mengenai benturan kepentingan dan telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **b. Proses** : Pemegang saham memberikan arahan strategis dan mendukung pengembangan usaha BPR dan proses pengambilan keputusan RUPS memperhatikan masukan dari berbahai pihak. **c. Hasil** : Pemegang saham tidak melakukan intervensi atau benturan kepentingan dan laporan penerapan keputusan RUPS memperhatikan masukan dari berbagai pihak. **Faktor Negatif sebagai berikut :** **a. Struktur** : Masih terdapat kualitas SDM yang kurang kompeten, sehingga perlu diberikan Pendidikan atau Training untuk menghindari berulangnya keterlambatan pelaporan. **b. Proses** : Pencapaian target tidak optimal karena kualitas kredit bermasalah (NPL) masih cukup tinggi dan selama beberapa saat Direksi kosong sehingga ekspansi kredit menurun. **c. Hasil** : Target strategis RBB belum tercapai seluruhnya, kedepannya untuk disinergikan.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	NIK	:	
	Nama	:	Hendra Nugraha
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk dan kepentingan tujuan BPR. b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RBB) dan menetapkan kebijakan strategis untuk pengembangan bisnis BPR. c. Menerapkan prinsip-prinsip GCG atau Tata Kelola dengan baik pada setiap satuan unit kerja. d. Memastikan seluruh kegiatan usaha, memenuhi aturan dan perundang undangan yang berlaku, serta mengelola risiko bank secara efektif. e. Menyampaikan Laporan Tahunan dan rencana kerja kepada Dewan Komisaris & RUPS. f. Bertindak atas nama BPR dalam kepengurusan maupun perwakilan didalam atau luar pengadilan.
2.	NIK	:	
	Nama	:	Sari Fitriah Habiba
	Jabatan	:	Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	a. Merumuskan strategi dan kebijakan kepatuhan untuk mendorong budaya patuh dalam organisasi. b. Memantau dan memastikan kegiatan operasional BPR tidak menyimpang dari kepatuhan. c. Melakukan review atas kebijakan dan prosedur yang berlaku. d. Mengelola Risiko Kepatuhan. e. Menyusun laporan secara berkala terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. f. Memastikan tindak lanjut atas temuan audit. g. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	:	a. Percepatan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian. b. Memperluas jaringan dalam pengembangan bisnis. c. Percepatan dalam penanganan penyelesaian kredit bermasalah d. Menjaga peningkatan Risiko Likuiditas.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	NIK	:	
	Nama	:	A. Teguh Galih Pamenang
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. c. Memberikan nasihat atau masukan kepada Direksi dan wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis. d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit. e. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. f. Melakukan penunjukan KAP berdasarkan kuasa yang didelegasikan melalui RUPS. g. .Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas pengawasan atas pengelolaan bank oleh Direksi selama tahun buku kepada RUPS.
2.	NIK	:	
	Nama	:	Agus Purnomo
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	a. Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. c. Memberikan nasihat atau masukan kepada Direksi dan wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis. d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit. e. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. f. Melakukan penunjukan KAP berdasarkan kuasa yang didelegasikan melalui RUPS. g. .Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas pengawasan atas pengelolaan bank oleh Direksi selama tahun buku kepada RUPS.
	Rekomendasi Kepada Direksi	:	a. Meningkatkan kerjasama bisnis dengan pihak terkait atau lembaga lain. b. Meningkatkan relasi penghimpunan dana dengan kerjasama BPR, Pensiunan Bank DKI, dll maupun dengan lembaga-lembaga yang mempunyai platform penghimpunan dana. c. Mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dan secara aktif melakukan upaya penjualan jaminan kredit bermasalah. d. Memastikan program APU, PPT dan PPPSPM berjalan dengan baik khususnya meninkatkan pengkinian data, pelaksanaan CDD dan EDD serta pelaksanaan pelatihan APU, PPT dan PPPSPM. e. Program kerja audit internal agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
4.	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
5.	Komite Lainnya**)		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (RP)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (RP) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Hendra Nugraha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Sari Fitriah Habiba	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (RP)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (RP) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		A. Teguh Galih Pamenang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Agus Purnomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1		Hendra Nugraha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Sari Fitriah Habiba	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1		A. Teguh Galih Pamenang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Agus Purnomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Hendra Nugraha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Sari Fitriah Habiba	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		A. Teguh Galih Pamenang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Agus Purnomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR.

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Hendra Nugraha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Sari Fitriah Habiba	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		A. Teguh Galih Pamenang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2		Agus Purnomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	60.000.000	2	240.000.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	480.005.663	2	498.119.888
Total Remunerasi			540.005.663		738.119.888
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas Lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			540.005.663		738.119.888

H.RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DALAM PERBANDINGAN

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**) (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,65 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,43 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,39 : 1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14 Januari 2025	2 Orang	Evaluasi Kinerja BPR
2	23 April 2025	2 Orang	Evaluasi Kinerja BPR
3	06 Oktober 2025	2 Orang	Evaluasi Kinerja BPR
4	30 Januari 2026	2 Orang	Evaluasi Kinerja BPR dan Evaluasi Penerapan APU PPT dan PPPSPM tahun 2025

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1		A. Teguh Galih Pamenang	2	0	100%
2		Agus Purnomo	2	0	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total *Fraud*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaian nya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihi	Nihil
Total	Nihi	Nihil

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil